



PEMERINTAH KOTA BIMA

LAPORAN KEUANGAN

BADAN KESBANGPOL

TAHUN ANGGARAN 2017



2018

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN
KEUANGAN (CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN)**

**DISESUIKAN DENGAN KODE
REKENING PENDAPATAN DAN BELANJA
YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
MASING-MASING SKPD**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Bima yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah dapat disusun. Laporan keuangan tersebut disusun sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2006 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah serta peraturan-peraturan perundangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas tersebut. Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini semoga dapat memberikan informasi yang cukup memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Bima.

Raba - Bima, 31 Desember 2017
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(ACH. FATHONI)
Nip. 19650620 198903 1 023

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggungjawab	v
I LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
II LAPORAN OPERASIONAL	
III LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
IV NERACA	
V CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	1
1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	6
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	8
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10
2.1 Ekonomi Makro.....	10
2.2 Kebijakan Keuangan.....	10
a. Pendapatan Daerah.....	10
b. Belanja Daerah.....	11
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	11
BAB III IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD.....	12
3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	12
3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.....	15
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	16
4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD.....	16
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	16
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.....	16

BAB V	PENJELASAN	POS-POS	LAPORAN	KEUANGAN	
	SKPD.....				30
4.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran				30
4.1.1	Pendapatan LRA				30
4.1.2	Belanja				31
4.2	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional				34
4.2.1	Pendapatan-LO				34
4.2.2	Beban				34
4.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....				39
4.3.1	Ekuitas Awal				40
4.3.2	Surplus/Defisit LO.....				40
4.3.3	Koreksi.....				40
4.4	Penjelasan Pos-Pos Neraca				40
4.4.1	Aset				40
4.4.2	Kewajiban				45
4.4.3	Ekuitas				45
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN				
	SKPD				46
BAB VI	PENUTUP				48
	LAMPIRAN-LAMPIRAN				

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 2	Laporan Operasional
Lampiran 3	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran 4	Laporan Neraca
Lampiran 5	Laporan Berita Acara Stock Opname Barang
Lampiran 6	Laporan Aset Tetap
Lampiran 7	Laporan Aset Lain-Lain
Lampiran 8	Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lain-lain

PEMERINTAH KOTA BIMA
SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca, (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bima, 31 Desember 2017

Pengguna Anggaran/KPA

(ACH. FATHONI)
Nip. 19650620 198903 1 023

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber dana, alokasi dana dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai teknis pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaannya disesuaikan dengan kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi sumber daya pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan, kemampuan dan dana yang sudah disediakan dalam anggaran APBD.

Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai teknis pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan SKPD dalam pelaksanaan dan memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, anggaran dan barang-barang investasi yang dikelolanya.

Untuk memenuhi tujuan umum tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berusaha untuk menyajikan informasi secara akuntabel mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Paragraf 13, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas dalam hal ini adalah pimpinan SKPD. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan instansi adalah setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap Walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi *"Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan"*.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai realisasi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, selama periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan

fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) **Transparansi**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) **Keseimbangan antar Generasi (Intergenerational Equity)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode akuntansi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan prinsip Akuntansi yang diberlakukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1) **Basis Akuntansi (*Accounting Base*)**

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Relaisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

2) **Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)**

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) **Prinsip Realisasi(*Realization Principle*)**

Pendapatan, belanja, pembiayaan dicatat dan diakui berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah terjadi.

4) **Prinsip substansi mengungguli bentuk formal(*Substance Over Form Principle*)**

Informasi akuntansi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya.

5) **Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)**

Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan, namun periode semesteran dan bulanan juga diperkenankan.

6) **Prinsip Konsistensi(*Consistency Principle*)**

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

8) Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban, ekuitas sebagai suatu entitas akuntansi.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas akuntansi dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- Pendapatan
- Belanja
- Surplus/Defisit
- Sisalebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode akuntansi.

b) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh

pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak pemerintah kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu pemerintah kota dari/kepada pemerintah kota lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- Kas
- Piutang
- Persediaan
- Investasi
- Aset Tetap
- Aset Lainnya
- Kewajiban
- Ekuitas

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Accrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja

- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
 - 4.2.1. Pendapatan-LO
 - 4.2.2. Beban
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1. Perubahan Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.4.1. Aset
 - 5.4.2. Kewajiban
 - 5.4.3. Ekuitas

5.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD

Bab VII Penutup

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran PerRincian Obyek

Lampiran 2 Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Lampiran 3 Laporan Realisasi DanaDekonsentrasi dan Laporan Dana Tugas
Pembantuan

Lampiran 4 Laporan Hibah Barang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
Lainnya

Lampiran 5 Laporan Piutang Pajak

Lampiran 6 Laporan Piutang Retribusi

Lampiran 7 Laporan Berita Acara Stock Opname Barang

Lampiran 8 Laporan Persediaan

Lampiran 9 Laporan Dana Bergulir

Lampiran 10 Laporan Aset Tetap

Lampiran 11 Laporan Aset Lain-Lain

Lampiran 12 Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Lain-lain

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya untuk kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin dari laju pertumbuhan PDRB berdasarkan dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan riil produksi barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh variabel perubahan harga.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya peranan tiap sektor dalam pembentukan PDRB, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan masing-masing sektor utamanya yaitu laju pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB.

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Pendapatan Daerah

Memperhatikan potensi yang masih akan dihadapi pada Tahun 2016, maka sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya, yang tercermin dari adanya peningkatan realisasi penerimaan PAD sebesar 0,00 % dari Rp. 0,00 (2015), dibandingkan dengan realisasi untuk tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 0,00

Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Selain itu, perlu tetap dihindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Belanja Daerah

1. Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJM Daerah sebesar Rp. 0,00 dan dialokasikan untuk belanja non program sebesar Rp. 0,00
2. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor pengangkutan-komunikasi dan sektor jasa-jasa.
3. Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
4. Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2016.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 atau lebih rendah/tinggi sebesar Rp.0,00 (0,00 %) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 0,00

Realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp. 3.413.583.520,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 3.490.722.001,19, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 77.138.481,19 (97.79 %). Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dalam pengeluaran total belanja secara umum yang mencakup belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Realisasi pendapatan di kurangi belanja pada tahun 2017 mengalami surplus/defisit sebesar Rp. 3.413.583.520,00 sehingga diperoleh Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp.3.413.583.520,00

BAB III

IKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPPA-SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima

Tahun Anggaran 2017

No.	Komponen	Tahun 2017 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
1.2	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan	0,00	0,00	0,00

No.	Komponen	Tahun 2017 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	0,00
2	Belanja Daerah			
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.520.597.801,19	1.481.493.066,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	1.520.597.801,19	1.481.493.066,00	
2.1.2	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	1.970.124.200,00	1.932.090.454,00	
2.2.1	Belanja Pegawai	765.124.000,00	759.574.000,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.048.100.200,00	1.018.848.300,00	
2.2.3	Belanja Modal	156.900.000,00	153.668.154,00	
Jumlah Belanja		3.490.722.001,19	3.413.583.520,00	97,79
3	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan		0,00	0,00	0,00
	SILPA	(3.490.722.001,19)	(3.413.583.520,00)	(97,79)

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima

Tahun Anggaran 2016

No.	Komponen	Tahun 2016(Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00

No.	Komponen	Tahun 2016(Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
1.2	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)			
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	0,00
2	Belanja Daerah			
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.496.662.143,58	1.486.476.018,00	99,31
2.1.1	Belanja Pegawai	1.496.662.143,58	1.486.476.018,00	99,31
2.1.2	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	2.039.466.502,00	2.014.875.200,00	98,79
2.2.1	Belanja Pegawai	629.320.000,00	618.513.000,00	98,28
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.304.596.502,00	1.292.562.200,00	99,07
2.2.3	Belanja Modal	105.750.000,00	103.800.000,00	98,15
Jumlah Belanja		3.536.128.645,58	3.501.351.218,00	99,01
3	Pembiayaan			
3.1	Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan		0,00	0,00	0,00
SILPA		(3.536.128.645,58)	(3.501.351.218,00)	(99,01)

Ikhtisar pencapaian kinerja Beberapa Badan Kesbangpol Kota Bima sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1.	Penyediaan Jasa surat menyurat	24.800.000	23.100.000	1.700.000	93,14
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.200.000	22.014.500	185.500	99,28
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27.300.000	25.370.000	1.929.900	92,93
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.960.000	45.960.000	0,00	100
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.890.000	8.690.000	1.200.000	87,86
6.	Penyediaan alat tulis kantor	22.114.500	22.114.500	0,00	100
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.750.000	24.750.000	0,00	100
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	3.225.000	3.225.000	0,00	100
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	114.650.000	113.650.000	1.000.000	99,12
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22.000.000	21.465.000	535.000	97,52
11.	Penyediaan makanan dan minuman	11.543.000	9.125.000	2.418.000	79,05
12.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	315.648.000	314.852.000	796.000	99,74
13.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.425.000	40.200.000	225.000	99,44
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	42.250.000	40.018.154	2.231.846	94,71
2.	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	36.453.600	36.401.600	52.000	99,85
3.	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	5.000.000	4.900.000	100.000	98,00
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	17.000.000	17.000.000	0,00	100
2.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	13.900.000	13.900.000	0,00	100
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan					
1.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	24.570.000	24.570.000	0,00	100

2.	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	15.570.000	14.070.000	1.500.000	90,36
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	18.070.000	18.070.000	0,00	100
4.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/ RKA/ DPA/ Satuan Kerja Perangkat Daerah	61.320.000	61.320.000	0,00	100
5.	Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD	24.570.000	24.570.000	0,00	100
e. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
1.	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	65.801.000	58.376.000	7.425.000	88,71
2.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	156.932.700	154.879.000	2.053.200	98,69
3.	Koordinasi Forum Antar Etnis	51.480.000	47.190.000	4.290.000	91,66
f. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan					
1	Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah strategis	340.710.000	336.164.500	4.545.500	98,66
2	Peningkatan Forum kewaspadaan Diri Masyarakat (FKDM)	55.790.000	55.735.000	55.000	99,90
3.	Koordinator Tim Terpadu Penanganan Gangguan keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Bima	74.612.000	74.399.800	212.200	99,71
g. Program Pendidikan Politik Masyarakat					
1.	Penyuluhan Kepada Masyarakat	137.464.000	136.791.500	672.500	99,51
2.	Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	144.125.000	139.218.200	4.906.800	96,59

2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

a. Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- Tersediaannya aparatur yang melaksanakan kegiatan
- Adanya obyek yang menjadi sasaran kegiatan
- Terlaksananya kegiatan yang direncanakan
- Peran serta masyarakat dalam Kesatuan Bangsa dan Politik

b. Faktor penghambat dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- Dana terbatas
- Kualitas SDM masih rendah
- Sarana terbatas
- Data masih kurang

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

- a. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/penggunaan barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Bangsa Kesatuan Bangsa dan Politik

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- 3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat:
 - Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/diseter kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA;

- Diterima di SKPD;
- Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;
- Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
- Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatansebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyeter;
- Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga)bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;
- Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;
- Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah KotaBima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Kota Bima;
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurangPendapatan LRA;
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*)atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama;
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*)atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi danpengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan tersebut oleh Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;
- Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

- Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 5) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 4) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 5) Belanja daerah diklasifikasikan menurut Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran dan Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- 6) Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar
- 7) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 8) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.
- 9) Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
- 10) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

- 11) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 12) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 13) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
 - Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
 - Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.
- 14) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

c. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan.
- 3) Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian

pinjaman dan Penerimaan piutang daerah, dan Penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.

- 4) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) daerah, Pembayaran pokok utang, dan Pemberian pinjaman daerah.
- 5) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 6) Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.
- 7) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 8) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- 9) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- 10) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 11) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 12) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memanfaatkan kansurplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

d. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- 4) Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 5) Pendapatan-LO pada SKPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- 6) PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima yang disahkan dengan penetapan.
- 7) PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kota Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan.
- 8) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

e. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- 3) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- 4) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

- 5) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 6) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

f. Aset/Aktiva

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. Aset Lancar

- a) Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c) Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

- d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) tanggal perolehannya.
- e) Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi SKPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK SKPD.
- f) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
- g) Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- h) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bima dan/atau hak Pemerintah Kota Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan atau akibat lainnya yang sah.
- i) Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
- j) Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat :Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- k) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- l) Persediaan dapat terdiri atas: Persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar, dan Persediaan bahan makanan pokok.
- m) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2. Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Investasi jangka panjang terdiri dari:
 - i. Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa: pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir, dan investasi non permanen lainnya.
 - ii. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa: penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.
- c) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria: Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
- d) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.

- e) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%, metode nilai bersih yang direalisasikan dengan kriteria kepemilikan bersifat non permanent.
- f) Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- g) Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.
- h) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
- i) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada..

3. Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.
- c) Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
- d) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- e) Peralatan dan mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.

- f) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.
- g) Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
- h) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
- i) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- j) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- k) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- l) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- m) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

- n) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
- o) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4. Dana Cadangan

- a) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

5. Aset Lainnya

- a) Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b) Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
- c) Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.
- d) Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- e) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
- f) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu

perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.

- g) Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.
- h) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- i) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- j) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- k) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
- l) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- m) Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.
- n) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga
- o) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

g. Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

4. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
5. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
7. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
8. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Ekuitas

1. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bima pada tanggal laporan
2. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas, dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan SKPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
4. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN KESBANGPOL DAN POLITIK

4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA tahun 2017 untuk Badan Kesbangpol dan Politik 0,00 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Realisasi Pendapatan-LRA tersebut mengalami peningkatan/penurunan dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 maka realisasi pendapatan-LRA tahun 2016 mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00 %.

Pendapatan Daerah Terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA tahun 2017 untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA tersebut mengalami peningkatan/penurunan dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 maka realisasi pendapatan (PAD)-LRAtahun 2017 mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA terdiri dari :

1) Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Pendapatan Pajak Daerah-LRAtahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tersebut mengalami peningkatan/penurunan dari target yang ditetapkan. Dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 0,00 maka realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA tahun 2017 menunjukkan peningkatan/penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tersebut mengalami peningkatan/penurunan dari target yang ditetapkan. Dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp. 0,00 maka realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tahun 2017 menunjukkan peningkatan/penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.. Dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 maka realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2017 menunjukkan peningkatan/penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.. Dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 maka realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LRA yang Sah tahun 2017 menunjukkan peningkatan/penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

4.1.2 Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Belanja aset Tetap Lainnya. Selain itu juga terdapat Belanja Tak Terduga.

Secara umum Belanja tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 3.490.722.001,01 dan terealisasi sebesar Rp. 3.413.583.520,00 atau 97,79%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 77.138.481 Terdapat penurunan realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp. 87.769.698 atau 2.57 % dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp. 3.501.353.218,00 disebabkan

Belanja tahun 2017 terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2015
1.	Belanja Operasi	3.333.822.001,19	3.259.915.366,00	97,78	3.397.551.218,00
2.	Belanja Modal	156.900.000,00	153.668.154,00	97,94	103.800.000,00
3.	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.490.722.001,19	3.413.583.520,00	97,79	3.501.351.218,00

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 3.333.822.001,19 dan terealisasi sebesar Rp. 3.259.915.366,00 atau

97,79 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 44.654.735,19 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 3.397.551.218,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2017 menunjukkan penurunan sebesar Rp. 137.635.852,00 atau 4,22 %.

Belanja Operasi tahun 2017 terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Belanja Pegawai	2.285.721.801,19	2.241.067.066,00	98,04	2.104.989.018,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.048.100.200,00	1.018.848.300,00	97,20	1.292.562.200,00
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.333.822.001,19	3.259.915.366,00	99,04	3.397.551.218,00

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.2.285.721.801,19 dan terealisasi sebesar Rp. 2.241.067.066,00 atau 98,42 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 44.654.735,00 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 2.104.989.018,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2017 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 136.078.084 atau 6,07 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
I.	Belanja Pegawai - Tak Langsung	1.520.597.801,19	1.481.493.066,00	97,42	1.486.476.018,00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.291.097.801,58	1.267.598.806,00	98,17	1.351.564.018,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	229.500.000,00	213.894.260,00	93,20	134.912.000,00
II.	Belanja Pegawai - Langsung	765.124.000,00	759.574.000,00	98,28	618.513.000,00
1.	Honorarium PNS	765.124.000,00	759.575.000,00	97,73	465.345.000,00
2.	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	100	153.168.000,00
Jumlah (I+II)		2.285.721.801,19	2.241.067.066,00	98,42	2.104.989.018,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 1.048.100.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.018.848.300,00 atau 97,20 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 29.251.500,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 1.292.562.200,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2017 menunjukkan penurunan sebesar Rp.273.713.900,00 atau 26,11 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	55.189.500,00	54.989.000,00	99,63	42.792.500,00
2.	Belanja Bahan/Materil	12.000.000,00	11.827.500,00	98,56	5.000.000,00
3.	Belanja Jasa Kantor	196.810.000,00	185.179.500,00	94,09	503.870.100,00
4.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.353.600,00	53.371.700,00	96,41	75.575.100,00
5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.421.000,00	12.171.000,00	97,98	15.975.000,00
6.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.200.000,00	2.900.000,00	55,76	6.250.000,00
7.	Belanja Makanan dan Minuman	84.318.000,00	80.325.000,00	96,26	99.670.000,00
8.	Belanja Pakaian Dinas dan Atibutnya	17.000.000,00	17.000.000,00	100	16.000.000,00
9.	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	13.900.000,00	13.900.000,00	100	16.000.000,00
10.	Belanja Perjalanan Dinas	434.926.100,00	432.783.900,00	99,50	504.429.500,00
11.	Belanja kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	78.230.000,00	74.638.700,00	95,40	
12.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	10.000.000,00
13.	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	77.752.000,00	74.862.000,00	96,28	10.000.000,00
Jumlah		1..048.100.200,00	1.018.848.300,00	99,09	1.292.562.200,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 156.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 153.668.154,00 atau 97,94 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 103.800.000,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2017 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 49.868.154,00 atau 32,45 %.

Belanja Modal terdiri dari :

No.	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
A.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.900.000,00	153.668.154.000,00	96,16	103.800.000,00
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	42.250.000,00	40.018.154,00	94,17	63.800.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan Rumah Tangga	4.500.000,00	4.500.000,00	100	12.960.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer	35.000.000.,00	34.000.000,00	97,14	40.000.000,00
3.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi kerja/Rapat Pejabat	62.900.000,00	62.900.000,00	100	0,00
4.	Belanja Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Komunikasi Telephone	12.250.000,00	12.250.000,00	100	0,00
JUMLAH		156.900.000,00	153.668.000,00	97,94	103.800.000,00

4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

4.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO tahun 2017 untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 %.

4.2.2 Beban

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyisihan Dana Bergulir dan Beban lain-lain

Belanja Operasi tahun 2017 terdiri dari :

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/P enurunan	%
1	Beban Pegawai	2.241.067.066,00	2.104.989.018,00	136.078.048	6,07
2	Beban Persediaan	301.252.100,00	346.213.500,00	(44.961.400)	(14,92)
3	Beban Jasa	205.049.500,00	532.119.100,00	(327.069.600)	(159,50)
4	Beban Pemeliharaan	4.900.000,00	10.000.000,00	(5.100.000)	(104,08)
5	Beban Perjalanan Dinas	432.783.900,00	504.429.500,00	(71.645.600)	(16,55)
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi		456.946.392,00		
Jumlah			3.653.198.727,00	280.871.891	7,13

Penjelasan masing-masing beban adalah sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.241.067.066,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 2.104.989.018,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp. 136.078.048,00 atau 6,07 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Beban Pegawai	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/Pe nurunan	%
1	Gaji dan Tunjangan				
	Gaji pokok PNS/uang Representasi	985.118.900,00	1.049.548.620,00	48.680.940,00	4,63

No.	Beban Pegawai	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/Pe nurunan	%
	Tunjangan Keluarga	78.897.662,00	79.655.060,00	(757,398)	(0,95)
	Tunjangan Jabatan	137.645.000,00	139.845.000,00	(2.200.000,00)	(1,59)
	Tunjangan Fungsional Umum	14.300.000,00	18.050.000,00	(3.750.000,00)	(26,22)
	Tunjangan Beras	46.928.160,00	49.245.600,00	(2.317.440,00)	(4,93)
	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	4.697.283,00	15.206.777,00	10.509.494	(223,7)
	Pembulatan Gaji	11.801,00	12.961,00	(1.160)	(9,82)
2	Tambahan Penghasilan PNS				
	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif	213.894.260,00	134.912.000,00	78.982.260	(36,92)
3	Honorarium PNS				
	Honorarium Panitia pelaksana kegiatan	578.864.000,00	338.795.000,00	240.069.000,00	(41,47)
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	0,00	700.000,00	(700.000)	(100)
	Honorarium tim Penerima Barang/Pemeriksaan	0,00	300.000,00	(300.000)	(100)
	Honorarium Tim Pengumpul data dan penyusunan naskah	141.500.000,00	90.750.000,00	50.750.000,00	35,86
	Honorarium pengelola keuangan	44.760.000,00	34.800.000,00	9.960.000,00	22,25
4	Honorarium non PNS				
	Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber	0,00	66.918.000,00	(66.918.000,00)	(100)
	Honorarium peserta kegiatan pengganti uang transport	0,00	86.250.000,00	(86.250.000,00)	(100)
	Jumlah Beban Pegawai	2.241.067.066,00	2.104.989.018,00	136.078.048	6,07

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun 2017 sebesar Rp. 301.252.100,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 346.213.500,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 44.961.400 atau (14.92 %) dengan rincian sebagai berikut ::

No.	Beban Persediaan	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan Pakai Habis				
	Belanja alat tulis kantor	45.924.000,00	34.364.500,00	11.559.500	25,17
	Belanja alat listrik dan elektronik	3.225.000,00	3.050.000,00	175.000	5,42
	Belanja Perangko dan Materai	3.150.000,00	2.748.000,00	402.000	12,76
	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.690.000,00	2.630.000,00	60.000	2,23
2	Beban Bahan/Material				
	Belanja Bahan Contoh	11.827.500,00	5.000.000,00	6.827.500	57,72
2	Beban Perawatan Kendaraan				
	Belanja Pengganti Suku cadang	12.700.000,00	17.495.000,00	(4.795.000)	(37,75)
	Belanja Bahan Bakar Minyak	23.701.600,00	36.081.000,00	(12.379.400)	(52,23)
3	Beban Cetak dan Penggandaan				
	Belanja cetak	0,00	8.950.000,00	(8.950.000)	(100)
	Belanja Pengandaan	12.171.000,00	15.525.000,00	(3.354.000)	(27,55)
	Belanja penjilidan	0,00	450.000,00	(450.000)	(100)
4	Beban Makanan dan Minuman				
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.595.000,00	14.470.000,00	(6.875.000)	(90,52)
	Belanja makanan dan minuman rapat	71.200.000,00	77.550.000,00	(6.350.000)	(8,91)
	Belanja makanan dan minuman tamu	1.530.000,00	7.650.000,00	(6.120.000)	(400)
5	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya				

No.	Beban Persediaan	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Belanja pakaian dinas harian	17.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000	5,88
6	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				
	Belanja Pakaian batik tradisional	13.900.000,00	18.000.000,00	(4.100.000)	(29,49)
7	Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				
	Uang saku peserta pelatihan, sosialisasi Bimtek dan lainnya	74.638.000,00	86.250.000,00	(11.612.000)	(15,55)
	Jumlah	301.252.100,00	346.213.500,00	(44.961.400)	(14,92)

c. Beban Jasa

Jumlah beban jasa pada tahun 2017 sebesar Rp.205.049.500,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 532.119.100,00 maka terjadi Penurunan sebesar Rp.327.069.600,00 (159,50 %) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Beban Jasa	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/P enurunan	%
1	Beban Jasa Kantor				
	Beban Telpon	22.014.500,00	4.327.500,00	17.687.000	80,34
	Beban Surat Kabar/Majalah	16.965.000,00	17.910.000,00	(945.000)	(5,57)
	Beban Jasa Non Pegawai	118.800.000,00	466.682.600,00	(347.882.600)	(292,83)
	Beban Jasa Publikasi/Iklan	27.400.000,00	14.950.000,00	12.450.000	45,43
	Jumlah	185.179.500,00	503.870.100,00	(318.690.600)	(172,09)
2	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor				
	Belanja Jasa Servis	14.500.000,00	20.000.000,00	5.500.000,00	(37,93)
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.470.100,00	1.999.000,00	471.100	19,07
	Jumlah	16.970.000,00	21.999.000,00	(5.029.000)	(29,63)
3	Beban Sewa	2.900.000,00	6.250.000,00	(3.350.000)	(115,51)

No.	Beban Jasa	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/P enurunan	%
	Belanja Sewa ruang rapat/Pertemuan	2.900.000,00	6.250.000,00	(3.350.000)	(115,51)
	Jumlah	2.900.000,00	6.250.000,00	(3.350.000)	(115,51)
	Total	205.049.500,00	532.119.100,00	(327.069.600)	(159,50)

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.900.000,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp. 5.100.000,00 (104,08%) dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Pemeliharaan	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.900.000,00	7.000.000,00	(2.100.000)	(42,85)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	3.000.000,00	(3.000.000)	(100)
	Jumlah	4.900.000,00	10.000.000,00	(5.100.000)	(104,08)

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2017 sebesar Rp 423.783.900,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 504.429.500,00 maka terjadi Penurunan sebesar Rp. 80.645.600 (19,02 %) dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Perjalanan Dinas	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/P enurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.320.000,00	18.315.000,00	36.005.000	66,28)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	378.463.900,00	486.114.500,00	(107.650.000)	(28,44)
	Total	432.783.900,00	504.429.500,00	(71.645.600)	(16,55)

f. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk tahun 2017 senilai Rp. 0,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 maka terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0.00 (0,00%)

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

1) Beban penyusutan aset tetap

Beban penyusutan atas aset tetap dan aset tak berwujud tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 maka terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00 (0,00 %) dengan rincian sebagai berikut :

No	Beban Penyusutan	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Peralatan dan Mesin				
2	Gedung dan Bangunan				
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Jumlah					

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 maka tidak terjadi Perubahan sebesar Rp. 0,00 (0 %) dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bagian Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah			0,00	0,00	0,00

h. Beban Penyisihan

Beban penyisihan di hitung dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima.

Beban penyisihan piutang tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 maka terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00 (0,00%)

i. **Beban Penyisihan Dana Bergulir**

Beban penyisihan dana bergulir tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 maka terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp. 0,00 (0,00 %)

4.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

4.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 bersumber dari ekuitas akhir tahun 2016. Jika dibandingkan Ekuitas awal tahun 2016 sebesar Rp.0,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp. 0,00 (%).

4.3.2 Surplus/Defisit LO

Defisit-LO pada periode bersangkutan sebesar Rp. 3.413.583.520.,00 yang bersumber dari Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan.

4.3.3 Koreksi

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

a) **Koreksi Persediaan**

Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;

b) **Koreksi Revaluasi (Penilaian Kembali) Aset Tetap**

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi (penilaian kembali) aset tetap merupakan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai yang tercatat aset tetap.

4.3.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 dan Jika dibandingkan Ekuitas akhir tahun 2016 sebesar Rp. 0,00 maka terdapat peningkatan/Penurunan sebesar Rp. 0,00 (%).

4.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca

4.4.1 Aset

a. Aset Lancar

1) Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan Retribusi/pajak sebesar Rp. 0,00 yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2017.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp. 0,00 merupakan saldo yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) per 31 Desember 2017.

3) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas atau Utang Pemptongan Pajak Pusat PPN dan PPh Tahun 2017 yang belum disetorkan ke Kas Negara atau Kas Daerah pada Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00

4) Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak merupakan tagihan Pemerintah Kota Bima kepada wajib pajak atas pajak daerah Per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00

5) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi merupakan tagihan Pemerintah Kota Bima kepada wajib retribusi atas piutang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, dan retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Per 31 Desember 2017 Rp. 0,00

6) Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang tahun 2017 sebesar Rp. 0,00

7) Belanja/Beban dibayar dimuka

Belanja/Beban dibayar dimuka adalah Beban yang dibayar dimuka secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi.

Belanja/Beban dibayar dimuka tahun 2017 sebesar Rp. 0,00

yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu maksimal 12 bulan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini dilakukan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tahun 2016 sebesar Rp. 0,00

9) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tahun 2017 sebesar Rp. 0,00

10) Piutang Lainnya

Saldo Piutang lainnya merupakan saldo Piutang Deviden yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp. 0,00 dengan uraian sebagai berikut:

11) Persediaan

Saldo Persediaan sebesar Rp 0,00 per 31 Desember 2017 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	ATK		
2.	Benda Pos		
Jumlah			

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi non permanen berupa dana bergulir per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00

c. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap tahun 2017 sebesar Rp. 0.00 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 0.00 maka Aset Tetap tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.0,00 atau %.

Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Tanah	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin		554.534.984,80
3.	Gedung dan Bangunan		25.967.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya		0,00
7.	Akumulasi Penyusutan		(456.946.392,00)
Jumlah			271.765.592,80

Penjelasan terhadap kondisi Aset Tetap tersebut, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Tanah

Jumlah tanah Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Kelurahan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Tanah Kantor	0,00	0,00

Tanah Sarana Umum Terminal	0,00	0,00
Tanah Fasilitas Umum	0,00	0,00
Dst.....	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Mutasi Aset Tetap Tanah selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2016		0,00
Penambahan :		0,00
- Belanja Modal Tahun 2017		
Pengurangan :		0,00
Saldo Per 31 Desember 2017		0,00

2) Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0.00.dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1. Alat Besar	-	-
2. Alat Angkut (Kendaraan)		298.254.300,00
3. Alat Bengkel & Alat Ukur		0,00
4. Alat Pertanian		0,00
5. Alat Kantor & Rmh.Tangga		208.865.380,00
6. Alat Studio & Komunikasi		47.415.304,35
7. Alat Kedokteran		0,00
8. Alat Laboratorium		0,00
9. Alat Keamanan / Senjata		0,00
10. dst.....		0,00
Jumlah		702.744.984,80

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2016		
Penambahan :		
- Belanja Modal Tahun 2017		
- Mutasi Masuk		
Pengurangan :		
-Mutasi Keluar		
Saldo Per 31 Desember 2017		

3) Gedung dan Banguna

Jumlah Gedung dan Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2017
1. Bangunan Gedung		
Jumlah		

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Koreksi	Saldo
Saldo Per 31 Desember 2015		25.967.000,00
Penambahan :		0,00
- Belanja Modal Tahun 2016		
Pengurangan :		0,00
Saldo Per 31 Desember 2016		25.967.000,00

4) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Akumulasi penyusutan tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 dari aset tetap dan akumulasi penyusutan tahun 2016 sebesar Rp. 0,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Tanah	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin		554.534.984,80
3.	Gedung dan Bangunan		25.967.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00
5.	Aset Tetap Lainnya		0,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan		0,00
7.	Akumulasi Penyusutan		(456.946.392,00)
	Jumlah		271.765.592,80

d. Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya tahun 2017 sebesar Rp. 0,00) yang terdiri dari :

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2016
1.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
2.	Aset Lain-lain		281.419.684,20
	Jumlah		281.419.684,20

1) Aset Tak Berwujud

Saldo aktiva tak berwujud sebesar Rp. 0,00.

2) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,00 yang bersumber dari Aset Tetap dalam keadaan rusak berat, Aset Tetap

yang Hilang dan Tidak Diketahui Keberadaannya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2017
1.	Rusak Berat	0,00	281.419.684,20
2.	Hilang	0,00	0,00
3.	Doble Pencatatan	0,00	0,00
Jumlah		281.419.684,20	281.419.684,20

4.4.2 Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2016 sebesar Rp. 0,00

3) Utang Belanja

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang Belanja tahun 2016 adalah sebesar Rp. 0,00

4) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang jangka pendek lainnya tahun 2016 adalah sebesar Rp. 0,00

4.4.3 Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tanggal laporan. Ekuitas terdiri atas ekuitas dan R/K PPKD.

Total ekuitas SKPD Tahun 2017 sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp. 0,00 dan devisit LO sebesar Rp. ().

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi yang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima:

- 1) Merumuskan dan menerapkan Visi Misi, rencana strategis serta program kerja Badan dan Kebijakan Tehnis di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- 2) Melakukan penyediaan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 3) Melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- 4) Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- 5) Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- 6) Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima sesuai dengan Surat Keputusan Walikota No. 821.02/876/BKD/VIII/2014 tanggal 8 Agustus tentang pengangkatan Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun 2014

Dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2015 didukung dengan SDM sebagai berikut :

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II			1		1
2	Eselon III			4		4
3	Eselon IV	2		7		9
4	Non Eselon	4		3		7
	Jumlah					21

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan:

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2					
2	S1			11	4	15
3	D3/D2/D1					
4	SMA		3	3		6
5	SMP					
6	SD					
	Jumlah		3	13	4	21

BAB VI

P E N U T U P

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/ Kelurahan untuk Tahun Anggaran 2016. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AKuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/ Kelurahan Tahun Anggaran 2016 ini, perlu kami simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2016 memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan SILPA.
 - a. Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dalam DPA Tahun Anggaran 2016.
 - b. Realisasi Belanja sebesar Rp. 3.501.351.218,00 atau 99,02 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 3.536.128.645,00 Tahun Anggaran 2016.
 - c. Realisasi Pembiayaan *Netto* sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 0,00 Tahun Anggaran 2016.
 - d. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 3.501.351.218,00 untuk Tahun Anggaran 2016.
2. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp. 0,00 atau Rp. 0,00 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dalam DPA Tahun Anggaran 2016;
 - b. Realisasi Beban Operasi sebesar Rp. 3.934.070.618,00 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :
 - Realisasi Beban Pegawai Rp. 2.104.989.018,00 atau 53,50%
 - Realisasi Beban Barang dan Jasa Rp. 532.119.100,00 atau 13,32%
 - Realisasi Beban Persediaan Rp. 246.013.500,00 atau 6,25%
 - Realisasi Beban Pemeliharaan Rp. 10.000.000,00 atau 0,25%
 - Realisasi Beban Perjalanan Dinas Rp. 504.429.500,00 atau 12,82%
 - Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 536.519.500,00 atau 13,63%
 - c. Surplus/deficit-LO sebesar Rp. 3.934.070.618,00 atau 7,17 %
3. Laporan Perubahan Ekuitas

4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana Per 31 Desember 2017.
- a. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset sebesar Rp. yang terdiri dari :
- Jumlah Aset Lancar sebesar Rp.
 - Jumlah Investasi Jangka Panjang sebesar Rp. 0,00
 - Jumlah Aset Tetap sebesar Rp.
 - Jumlah Aset Lainnya adalah sebesar Rp.
- b. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,00
- c. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. ()
- d. Jumlah kewajiban dan kuitas dana per 31 Desember 2017 sebesar Rp. ()

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang capaian kinerja, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar isi atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD dan Neraca.

Kami berharap penyampaian catatan atas laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan independensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Raba - Bima, 31 Desember 2017
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

(ACH. FATHONI)
Nip. 196502131992031011



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	JUMLAH PENDAPATAN (10 s/d 13)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BELANJA				
9	BELANJA OPERASI				
10	Belanja Pegawai	2.285.721.801,19	2.241.067.066,00	98,05	2.104.989.018,00
11	Belanja Barang	1.048.100.200,00	1.018.848.300,00	97,21	1.292.562.200,00
12	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jumlah Belanja Operasi (10 s/d 14)	3.333.822.001,19	3.259.915.366,00	97,78	3.397.551.218,00
15	BELANJA MODAL				
16	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin	156.900.000,00	153.668.154,00	97,94	103.800.000,00
18	Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Belanja Modal (16 s/d 20)	156.900.000,00	153.668.154,00	97,94	103.800.000,00
22	BELANJA TAK TERDUGA				
23	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jumlah Belanja Tak Terduga (23)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	JUMLAH BELANJA (14 + 21 + 24)	3.490.722.001,19	3.413.583.520,00	97,79	3.501.351.218,00
26	SURPLUS / (DEFISIT) (7 - 25)	(3.490.722.001,19)	(3.413.583.520,00)	(97,79)	(3.501.351.218,00)
27	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 26)	(3.490.722.001,19)	(3.413.583.520,00)	(97,79)	(3.501.351.218,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kota Bima, 2018
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

ACH. FATHONI
 Nip. 19650213 199203 1 1023



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN OPERASIONAL
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
10	Pendapatan hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (10)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	JUMLAH PENDAPATAN (8 + 10)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BEBAN				
14	Beban Pegawai	2.241.067.066,00	2.104.989.018	136.078.048,00	6,07
15	Beban Persediaan	301.252.800,00	346.213.500	(44.960.700,00)	(14,92)
16	Beban Jasa	205.049.500,00	532.119.100	(327.069.600,00)	(159,50)
17	Beban Pemeliharaan	4.900.000,00	10.000.000	(5.100.000,00)	(104,08)
18	Beban Perjalanan Dinas	432.783.900,00	504.429.500	(71.645.600,00)	(16,55)
19	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	-
20	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	-
21	Beban Penyusutan dan Amortisasi	462.246.000,95	536.519.500	(74.273.499,05)	(16,55)
22	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	-
23	Beban Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	-
24	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	-
25	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	-
26	JUMLAH BEBAN (14 s/d 25)	3.647.299.266,95	4.034.270.618	(238.424.352,95)	(1,042)
27	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (12 - 26)	(3.647.299.266,95)	(4.034.270.618)	(386.971.351,05)	(1,042)
28	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
29	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	-
30	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
31	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	-
32	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
33	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	-
34	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (29 s/d 33)	0,00	0,00	0,00	-
35	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (27 - 34)	(3.647.299.266,95)	(4.034.270.618)	(386.971.351,05)	(1,042)
36	POS LUAR BIASA				
37	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	-
38	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	-
39	JUMLAH POS LUAR BIASA (37 s/d 38)	0,00	0,00	0,00	-
40	SURPLUS/DEFISIT-LO (35 - 39)	(3.647.299.266,95)	(4.034.270.618,00)	(386.971.351,05)	(1,042)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Kota Bima, 2018
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

ACH. FATHONI
 Nip. 19650213 199203 1 023

Lampiran 1 Surat Edaran
Nomor : / /I/2018
Tanggal : Januari 2018



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2017	2016
1	Ekuitas Awal	321.520.204,00	282.405.777,00
2	Surplus/Defisit LO	(3.259.915.366,00)	(3.479.969.939,00)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Lain-lain	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	17.460.148,00
4	Kewajiban Untuk dikonsolidasikan	3.413.583.520,00	3.501.351.218,00
5	Ekuitas Akhir	475.188.358,00	321.520.204,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kota Bima, 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

ACH. FATHONI
Nip. 19650213 199203 1 023



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
NERACA
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2017	2016
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas Di Kas Daerah	0,00	0,00
4	Kas Dana Kapitasi	0,00	0,00
5	Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
7	Piutang Pajak	0,00	0,00
8	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00
9	Piutang Pajak Netto	0,00	0,00
10	Piutang Retribusi	0,00	0,00
11	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00
12	Piutang Retribusi Netto	0,00	0,00
13	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00
14	Piutang Deviden	0,00	0,00
15	Bagian Lancar Tuntuta Ganti Rugi	0,00	0,00
16	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
17	Persediaan	35.000,00	362.500,00
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)	35.000,00	362.500,00
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		
20	Investasi Non Permanen		
21	Dana Bergulir	0,00	0,00
22	Dana bergulir diragukan tertagih	0,00	0,00
23	Jumlah Investasi Non Permanen (21+22)	0,00	0,00
24	Investasi Permanen		
25	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
26	Jumlah Investasi Permanen (25)	0,00	0,00
27	Jumlah Investasi Jangka Panjang (23 + 26)	0,00	0,00
28	ASET TETAP		
29	Tanah	-	0,00
30	Peralatan dan Mesin	929.926.410,53	554.534.984,80
31	Gedung dan Bangunan	25.967.000,00	25.967.000,00
32	Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00	0,00
33	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
34	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
35	Akumulasi Penyusutan	(462.246.000,95)	(536.519.500,00)
36	Jumlah Aset Tetap (29 s/d 35)	493.647.409,58	43.982.484,80
37	ASET LAINNYA		
38	Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
39	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
40	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
41	Aset Tak Berwujud Netto	0,00	0,00
42	Aset Lain-lain	281.419.684,20	281.419.684,20
43	Jumlah Aset Lainnya (38 s/d 42)	281.419.684,20	281.419.684,20
44	JUMLAH ASET (18 + 27 + 36 + 43)	775.102.093,78	325.764.669,01

NO.	URAIAN	2017	2016
45	KEWAJIBAN		
46	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
47	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
48	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
49	Utang Belanja	3.896.651,00	0,00
50	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
51	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (47 s/d 50)	3.896.651,00	0,00
52	JUMLAH KEWAJIBAN (51)	3.896.651,00	0,00
53	EKUITAS		
54	Ekuitas	474.860.858,00	321.520.204,00
55	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (52 + 54)	478.757.509,00	321.520.204,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kota Bima, 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

ACH FATHONI
Nip. 19650213 199203 1 023